# ABSTRAK

Salsabila Alaudin, NIM: 126101202156, Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Prof. Dr. Iffatin Nur, M. Ag.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Pengadilan Agama Tulungagung, Maqashid Syariah Fil Muamalah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia perekonomian khususnya ekonomi syariah di Indonesia yang semakin berkembang dan tumbuh dengan pesat. Semakin luas dan berkembangnya kegiatan ekonomi dan pola bisnis yang sangat pesat di kalangan masyarakat, tak dapat dipungkiri akan menimbulkan munculnya banyak sengketa sekonomi syariah. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan perdata di pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah seperti yang telah diteliti oleh penulis, yakni perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA. Kedua perkara tersebut merupakan perkara tentang wanprestasi, dimana pihak Tergugat selaku nasabah menerima akad pembiayaan dari pihak Penggugat selaku LKMS.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tulungagung?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA?, serta 4) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariiah di Pengadilan Agama Tulungagung perspektif Maqashid Syariah Fil Muamalah?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertimbangan hakim atas sengketa ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Tulungagung menurut Maqashid Syariah Fil Muamalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dengan hakim yang memutus perkara ekonomi syariah beserta panitera, dan dokumentasi terhadap sumber data dari Pengadilan Agama Tulungagung berupa salinan putusan nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Sengketa Ekonomi Syariah yang diputus di Pengadilan Agama Tulungagung sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sekarang ini totalnya terdapat 7 perkara. Sengketa ekonomi syariah ini terjadi karena adanya wanprestasi atau cidera janji, dimana pihak Tergugat selaku nasabah menerima fasilitas pembiayaan akad murabahah dan musyarakah dari pihak Penggugat selaku LKMS tetapi pihak Tergugat tidak menjalankan prestasinya sehingga hal tersebut merugikan pihak Penggugat. Penulis memilih 2 perkara dari 7 perkara tersebut untuk diteliti karena perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara ekonomi syariah yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia, dan ahli warisnya dituntut untuk menyerahkan harta warisan sebagai penutup hutang-hutang dari pihak Tergugat. Sedangkan perkara yang satunya yang semula menggunakan skema akad kredit kemudian karena adanya penggabungan usaha ke lembaga keuangan syariah, maka semua akad kreditnya dirubah ke pembiayaan syariah. Selain itu karena kedua putusan ini masih baru diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga penulis rasa putusan ini masih hangat untuk diteliti. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama Tulungagung melihat dari alasan gugatan penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum di dalam persidangan. Pada perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA, majelis hakim dalam putusannya tidak menerima gugatan penggugat karena majelis hakim melihat dari

gugatannya dengan bukti-bukti yang diajukan banyak yang tidak jelas, sehingga gugatannya *obscure libel* (kabur). Sedangkan pada perkara nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, hakim menyatakan pihak Tergugat melakukan wanprestasi karena memang benar bahwa pihak Tergugat telah menerima akad pembiayaan dari pihak Penggugat tetapi pihak Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati serta menghukum para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak Penggugat. 3) Akibat hukum dari putusan perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA yakni, pihak Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali setelah memperbaiki seluruh isi gugatannya. Sedangkan pada perkara nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA yakni, karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara. 4) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus sengketa ekonomi syariah telah sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah Fil Muamalah. Karena di dalam memberikan putusan, hakim telah memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Bahwa dengan adanya putusan tersebut dimaksudkan sebagai sanksi bagi nasabah yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah akad (perjanjian).

# ABSTRACT

Salsabila Alaudin, NIM: 126101202156, Sharia Microfinance Institution Disputes Maqashid Syariah Fil Muamalah Perspective (Case Study at Tulungagung Religious Court), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Prof. Dr. Iffatin Nur, M. Ag.

**Keywords: Judge's Consideration, Default, Tulungagung Religious Court, Maqashid Syariah Fil Muamalah.**

This research is motivated by the development of the economic world, especially the Islamic economy in Indonesia which is growing and growing rapidly. The wider and more rapid development of economic activities and business patterns among the public, it is undeniable that it will cause the emergence of many sharia economic disputes. So to resolve the dispute, the party who feels aggrieved makes a civil lawsuit in court. This research was conducted at the Tulungagung Religious Court. The Tulungagung Religious Court has accepted several sharia economic cases as examined by the author, namely case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA and number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA. Both cases are cases of default, where the Defendant as the customer receives a financing contract from the Plaintiff as an MFI.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the dispute over Sharia Microfinance Institutions in the Tulungagung Religious Court?, 2) How is the analysis of the judge's consideration in deciding sharia economic cases in the Tulungagung Religious Court?, 3) What are the legal consequences of the decision of case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA and number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA?, and 4) How is the analysis of the judge's consideration in deciding sharia economic cases at the Tulungagung

Religious Court perspective Maqashid Sharia Fil Muamalah?. The purpose of this study is to analyze the judge's consideration of sharia economic disputes in the Tulungagung Religious Court according to Maqashid Syariah Fil Muamalah.

This research uses *field research* that uses qualitative methods using descriptive types and uses a normative approach to determine the judges' considerations and decisions in resolving sharia economic disputes at the Tulungagung Religious Court. The data collection techniques used are observation, interviews with judges who decide sharia economic cases and clerks, and documentation of data sources from the Tulungagung Religious Court in the form of copies of decisions number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA and number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA and other library materials related to the research theme.

The results of the research in this study are: 1) Sharia Microfinance Institution disputes decided at the Tulungagung Religious Court from 2020 to 2024 now there are a total of seven cases. This sharia economic dispute occurred due to default or default, where the Defendant as a customer received murabahah and musharakah contract financing facilities from the Plaintiff as an sharia microfinance institutions but the Defendant did not carry out its achievements so that it harmed the Plaintiff. The author choose two cases out of seven to be examined because the case that the author is researching is a sharia economic case in which one of the parties has died, and his heirs are required to hand over inheritance as cover for debts from the Defendant. While the other case that originally used the credit contract scheme then due to the merger of busineses into Islamic financial institutoins, all credit contracts were changed to sharia financing. In addition, because these two rulings have only been decided by the Religious Court, so the author feels that this ruling is still warm to be examined. 2) The judge's legal considerations in deciding sharia economic cases, the judge of the Tulungagung Religious Court looks at the reasons for the plaintiff's lawsuit, the evidence submitted by the parties and the legal facts in the trial. In

case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA, the panel of judges in its decision did not accept the plaintiff's claim because the panel of judges saw from the lawsuit with the evidence submitted that was not clear, so the lawsuit was *obscure libel* (vague). Meanwhile, in case number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, the judge stated that the Defendant committed default because it was true that the Defendant had received a financing contract from the Plaintiff but the Defendant could not fulfill the performance as agreed and punished the Defendants to pay off all their obligations to the Plaintiff. 3) The legal consequence of the decision in case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA is that the Plaintiff can file his lawsuit again after correcting all the contents of the lawsuit. Meanwhile, in case number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, that is, because the Defendant is the losing party, the Defendant is required to pay the costs of the case. 4) The legal considerations of Tulungagung Religious Court judges in deciding sharia economic disputes are in line with the principles of Maqashid Syariah Fil Muamalah. Because in giving a decision, the judge has paid attention to the factors that should be applied proportionally, namely justice, legal certainty and also expediency. That the decision is intended as a sanction for customers who are negligent in carrying out their obligations so as not to repeat their actions again and to provide a deterrent effect to people who default from a contract (agreement).

**خلاصة**

سلسبيلا علاءالدين، 126101202156، منازعات مؤسسة التمويل الأصغر الشرعية منظور مقاشد الشريعة في المعاملات (دراسة حالة في محكمة تولونغاغونغ الدينية) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة والعلوم القانونية ، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونغاغونغ، 2024، المشرف: البروفيسور الدكتور إففاتين نور، م..

**المفردات الرئيسية : نظر القاضي، التقصير، محكمة تولونغاغونغ الدينية، مقاشد الشريعة في المعاملات .**

الدافع وراء هذا البحث هو تطور العالم الاقتصادي ، وخاصة الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا إندونيسيا الذي ينمو وينمو بسرعة. كلما كان التطور الأوسع والسريع للأنشطة الاقتصادية وأنماط الأعمال بين الجمهور ، لا يمكن إنكار أنه سيؤدي إلى ظهور العديد من النزاعات الاقتصادية الشرعية .لذلك لحل النزاع ، يقوم الطرف الذي يشعر بالظلم برفع دعوى مدنية في المحكمة .وقد أجري هذا البحث في محكمة تولونغاغونغ الدينية .قبلت محكمة تولونغاغونغ الدينية عدة قضايا اقتصادية شرعية كما نظر فيها صاحب البلاغ، وهي القضية رقم Pdt.G / 2022 / PA.TA 2630 / والقضية رقم Pdt.G.S/2023/PA.TA. 1/كلتا الحالتين هي حالات تقصير ، حيث يتلقى المدعى عليه كعميل عقد تمويل من المدعي بصفته مؤسسة تمويل أصغر .

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: 1) كيف هو الخلاف حول مؤسسات التمويل الأصغر الشرعية في محكمة تولونغاغونغ الدينية؟، 2) كيف يتم تحليل نظر القاضي في البت في القضايا الاقتصادية الشرعية في محكمة تولونغاغونغ الدينية؟، 3) ما هي الآثار القانونية المترتبة على قرار القضية رقم Pdt.G/2022/PA.TA 2630/ورقم Pdt.G.S/2023/PA.TA1/؟، و 4) كيف يتم تحليل نظر القاضي في البت في القضايا الاقتصادية الشرعية من منظور محكمة تولونغاغونغ الدينية مقاشد الشريعة في المعاملات؟ .الغرض من هذه الدراسة هو تحليل نظر القضاة في النزاعات الاقتصادية الشرعية في محكمة تولونغاغونغ الدينية وفقا لمقاشد الشريعة في المعاملات.

يستخدم هذا البحث *البحث الميداني* الذي يستخدم الأساليب النوعية باستخدام الأنواع الوصفية ويستخدم المنهج المعياري لتحديد اعتبارات القضاة وقراراتهم في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية في محكمة تولونغاغونغ الدينية .تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات مع القضاة

الذين يقررون القضايا الاقتصادية الشرعية والكتبة وتوثيق مصادر البيانات من محكمة تولونغاغونغ الدينية في شكل نسخ من القرارين رقم 2630 PA.TA / 2022 / Pdt.G/ ورقم 1 Pdt.G.S / PA.TA / 2023 /وغيرها من مواد المكتبة المتعلقة بموضوع البحث .

نتائج البحث في هذه الدراسة هي: 1) نزاعات مؤسسة التمويل الأصغر الشرعية التي تم البت فيها في محكمة تولونغاغونغ الدينية من 2020 إلى 2024 الآن هناك ما مجموعه 7 قضايا .حدث هذا النزاع الاقتصادي الشرعي بسبب التخلف عن السداد أو التقصير ، حيث تلقى المدعى عليه كعميل تسهيلات تمويل عقود المرابحة والمشاركة من المدعي بصفته مؤسسة تمويل أصغر ولكن المدعى عليه لم ينفذ إنجازاته بحيث أضر بالمدعي .يختار المؤلف 2 من أصل 7 ليتم فحصها لأن القضية التي يبحث فيها المؤلف هي قضية اقتصادية شرعية توفي فيها أحد الطرفين ، ويطلب من ورثته تسليم الميراث كغطاء لديون المدعى عليه .في حين أن الحالة الأخرى التي استخدمت في الأصل مخطط عقود الائتمان ثم بسبب اندماج الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية ، تم تغيير جميع عقود الائتمان إلى التمويل الشرعي .وبالإضافة إلى ذلك، ولأن هذين الحكمين لم تبتا فيهما إلا المحكمة الدينية، فإن صاحب البلاغ يرى أن هذا الحكم لا يزال حارا للنظر فيه .2) الاعتبارات القانونية للقاضي في البت في القضايا الاقتصادية الشرعية ، ينظر قاضي محكمة تولونغاغونغ الدينية في أسباب دعوى المدعي ، والأدلة المقدمة من الأطراف والوقائع القانونية في المحاكمة .في القضية رقم Pdt.G/2022/PA.TA2630/، لم تقبل هيئة القضاة في قرارها مطالبة المدعي لأن هيئة القضاة رأت من الدعوى مع الأدلة المقدمة أنها غير واضحة، لذلك كانت الدعوى *تشهيرا غامضا* )غامضا .(وفي الوقت نفسه ، في القضية رقم 1 / PA.TA / 2023 / Pdt.G.S، ذكر القاضي أن المدعى عليه ارتكب تقصيرا لأنه كان صحيحا أن المدعى عليه قد تلقى عقد تمويل من المدعي ولكن المدعى عليه لم يستطع الوفاء بالأداء كما هو متفق عليه وعاقب المدعى عليهم على سداد جميع التزاماتهم تجاه المدعي .3) النتيجة القانونية للقرار في القضية رقم 2630 PA.TA / 2022 / Pdt.G / هي أنه يمكن للمدعي رفع دعواه مرة أخرى بعد تصحيح جميع محتويات الدعوى .وفي الوقت نفسه ، في القضية رقم 1 2023 / Pdt.G.S / PA.TA /، أي لأن المدعى عليه هو الطرف الخاسر ، يتعين على المدعى عليه دفع تكاليف القضية .4) تتماشى الاعتبارات القانونية لقضاة المحكمة الدينية في تولونغاغونغ عند البت في النزاعات الاقتصادية الشرعية مع مبادئ مقاشد الشريعة في المعاملات .لأنه عند إصدار القرار ، اهتم القاضي بالعوامل التي يجب تطبيقها بشكل متناسب ، وهي العدالة واليقين القانوني وكذلك النفعية .أن القرار

يقصد به معاقبة العملاء المهملين في تنفيذ التزاماتهم حتى لا يكرروا أفعالهم مرة أخرى ولتوفير تأثير رادع للأشخاص الذين يتخلفون عن العقد (الاتفاق).